DINAS PUPR DAN SEJUMLAH TEMPAT DIGELEDAH

# KPK Usut Dugaan Korupsi di Banjarnegara

**BANJARNEGARA (KR)** - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah orang kepercayaan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono berinisial EA untuk penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

Penggeledahan di rumah EA yang berlokasi di Desa Blambangan RT 03 RW 07, Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, berlangsung, Selasa (10/8). Sebelumnya, Tim KPK menggeledah Rumah Dinas Bupati Banjarnegara, Kompleks Pendopo Dipayudha Banjarnegara dan Kantor Bupati dan kompleks Sekretariat Daerah Banjarnegara.

Setelah melakukan penggeledahan selama kurang lebih 1,5 jam, Tim KPK meninggalkan rumah itu dan menuju sebuah gudang material milik EA yang berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya. Usai melakukan kegiatan di dalam gudang, Tim KPK segera meninggalkan tempat itu pada pukul 16.00 WIB.

Saat ditemui wartawan, Ketua RT 03/RW 07 Desa Blambangan, Waluyo mengaku diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah EA. Ia mengaku melihat KPK membawa banyak dokumen di antaranya berupa sertifikat tanah. Dalam dokumen yang ditunjukkan KPK, katanya, ada sekitar 10 sertifikat tanah atas nama EA.

Seperti diketahui KPK melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Jateng Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi. Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam penggeledahan telah mengamankan dokumen dan barang elektronik. Mengenai dua lokasi yang digeledah, menurut Ali, masing-masing Kantor Dinas PUPR Banjarnegara dan Kantor PT Bumirejo yang sama-sama berlokasi di Jalan DI Panjaitan Banjarnegara. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara pada tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

Sehubungan bukti-bukti yang telah diamankan itu, tutur Ali, akan dianalisis lebih lanjut. Setelah itu, dilakukan penyitaan untuk melengkapi pembuktian berkas perkara. **(Ful/Mad)-f**

KERUGIAN CAPAI RP 5 MILIAR

# Polres Sukoharjo Tangkap Pelaku Penipuan CPNS

**SUKOHARJO (KR)** - Polres Sukoharjo menangkap JS (50), mantan kepala desa warga Klayapan Desa Klagen Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Jatim. Ia diduga menjadi pelaku penipuan dengan modus menawarkan dan menjanjikan korban bisa masuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur politik atau jalur kebijakan nasional tanpa tes. Total kerugian akibat perbuatan JS dari 52 orang korban penipuan sebesar Rp 5.181.000. 000. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

KR-Wahyu Imam Ibadi

***Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan menunjukkan tersangka JS dan barang bukti.***

Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, Selasa (10/8) mengatakan, kronologis kejadian bermula pada tahun 2018 anak angkat korban, Suharti menghubungi korban Dul Gani (58) warga Tegal Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban melalui telepon dan memberitahu, ada tersangka JS ingin kenal dengan korban dan katanya bisa membantu memasukkan CPNS.

**(Mam)-f**

PPKM LEVEL 4 DIPERPANJANG

# Destinasi Wisata di DIY Belum Boleh Buka

**YOGYA (KR)** - Pemerintah pusat telah memutuskan untuk kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel dari 10 Agustus sampai 16 Agustus mendatang. Adapun untuk wilayah DIY secara prinsip tidak banyak berbeda dari sebelumnya karena semua kabupaten /kota di DIY masih menerapan PPKM level 4. Sehingga kebijakan-kebijakan yang ada tidak jauh berbeda dari sebelumnya termasuk untuk destinasi wisata dan mal yang belum diperbolehkan untuk buka.

"Meski dalam perpanjangan PPKM kali ini pemerintah pusat mulai melakukan uji coba pembukaan mal, pusat perdagangan, dan pusat perbelanjaan dengan persyaratan tertentu. Namun kebijakan itu hanya diberlakukan untuk DKI Jakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang, tapi tidak berlaku untuk DIY. Padahal daerah-daerah itu juga termasuk PPKM level 4, jadi kalau ditanya apa yang menjadi penyebabnya saya tidak tahu," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di ruang kerjanya, Selasa (10/8).

Baskara Aji mengatakan, saat ini kasus harian di DIY masih fluktuatif, untuk itu pihaknya meminta agar semua pihak bisa melaksanakan poin-poin yang ada dalam PPKM dengan sebaik-baiknya. Termasuk yang berkaitan dengan penegakan Prokes dan pengurangan mobilitas. Karena hanya dengan cara tersebut penularan kasus positif diharapkan bisa ditekan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (9/8) memutuskan kembali memperpanjang PPKM berbasis level 2, 3, dan 4 di sejumlah wilayah Jawa dan Bali mulai 10 hingga 16 Agustus 2021.

Hal tersebut diungkapkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangannya di Jakarta. Senin (9/8). "Atas arahan presiden, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai 16 Agustus 2021," kata Luhut.

Sementara itu, tren angka kasus sembuh dari Covid-19 lebih tinggi dibandingkan penambahan kasus baru di DIY. Dari data yang disampaikan Kabag Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Ditya Nanaryo Aji terdapat penambahan kasus sembuh harian sebanyak 2.648 kasus sehingga total sembuh menjadi 95.592 kasus di DIY pada Selasa (10/8).

"Meskipun angka sembuh terus mengalami peningkatan setiap harinya, namun masyarakat agar tetap waspada dan tidak lengah dalam menjalani protokol kesehatan. Pasalnya kasus terkonfirmasi masih terus bertambah sebanyak 1.487 kasus maka totalnya menjadi 131.901 kasus di DIY," tuturnya. **(Ria/Ira/Sim)-f**

AGENDA REFORMASI STRUKTURAL

# Pangkas Penghambat Kemudahan Berusaha

**JAKARTA (KR)** - Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, tidak menghentikan upaya Pemerintah untuk terus melanjutkan berbagai agenda reformasi struktural. Selain itu, aturan yang menghambat kemudahan berusaha juga terus dipangkas dan di saat yang sama prosedur berusaha dan investasi terus dipermudah.

Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan pada peluncuran Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, di Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (9/8).

Presiden menjelaskan, upaya-upaya tersebut dilakukan agar iklim usaha di Indonesia semakin kondusif. "Kita ingin iklim usaha di negara kita berubah makin kondusif, memudahkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah untuk memulai usaha, meningkatkan kepercayaan investor untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sehingga menjadi solusi atas persoalan pengangguran yang bertambah akibat dampak pandemi," ujar Presiden.

Dalam laporan Bank Dunia tahun 2020, Indonesia masuk peringkat ke-73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha atau *Easy of Doing Business* (EoDB). Hal tersebut berarti negara Indonesia termasuk kategori mudah dalam hal perizinan. Namun, Presiden mendorong agar kategori tersebut ditingkatkan lagi dari mudah menjadi sangat mudah.

"Kita harus mampu meningkatkan lagi, tingkatkan lagi dari mudah menjadi sangat mudah, itu target kita. Kuncinya ada di reformasi perizinan, perizinan berusaha yang terintegrasi, yang cepat, dan yang sederhana menjadi instrumen yang menentukan daya saing kita untuk menarik investasi," tegasnya.

**(Sim/Lmg)-d**

PEDULI PENANGANAN PANDEMI COVID-19

# BI dan Perbankan di DIY Salurkan Bantuan Alkes

Penyerahan bantuan secara simbolis oleh Deputi Kepala Perwakilan BI DIY dan BMPD DIY kepada Sonjo DIY

Deputi Kepala Perwakilan BI DIY bersama GenBI melakukan koordinasi dengan Sonjo DIY.

Penyerahan bantuan dari Kantor perwakilan BI DIY bersama GenBI DIY

Penyerahan bantuan secara simbolis oleh Deputi Kepala Perwakilan BI DIY dan BMPD DIY kepada Sonjo DIY

**YOGYA (KR)** - Bank Indonesia (BI) bersama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) DIY dan Generasi Baru Indonesia (GenBI) DIY turut berpartisipasi dan peduli dalam penanganan pandemi Covid-19 di DIY. Kepedulian tersebut diwujudkan dalam penyaluran bantuan alat kesehatan (alkes) dan sarana prasarana (sarpras) penanganan pandemi antara lain berupa oximeter, tensimeter, thermogun, tempat tidur dan kasur, peti mati, kantong jenazah dan alat pelindung diri (APD)

Bantuan disalurkan kepada Sambatan Jogja ( Sonjo) DIY yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kurang lebih 35 shelter dan 19 Rumah Sakit (RS) yang tersebar di DIY. Hadir dalam penyerahan bantuan secara simbolis Deputi Kepala Perwakilan BI DIY Miyono, Ketua Bidang Sosial BMPD DIY Ascar Setiyono kepada perwakilan sekaligus inisiator Sonjo DIY Rimawan Pradiptyo di BPBD DIY, Selasa (10/8).

Deputi Kepala Perwakilan BI DIY Miyono mengatakan bantuan tersebut sebagai wujud solidaritas dan kepedulian terhadap penanganan pandemi seiring dengan penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di DIY. Penyerahan bantuan ini dilakukan sebagai bentuk kolaborasi nyata dengan konsep Pentahelix dimana unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha dan media bersatu membangun kebersamaan dan berjuang bersama menghadapi pandemi.

" Perlu menguatkan semangat gotong royong dan empati dalam mengatasi pandemi. Gotong royong menghadapi pandemi ini adalah kunci, saling peduli dan membantu bersama," tuturnya.

Inisiator Gerakan Sonjo Rimawan Pradiptyo menyampaikan apresiasi atas bantuan BI, BMPD Dan GenBI DIY ini guna mendukung relawan dan membantu shelter-shelter yang ada di kampung maupun desa-desa. Pihaknya sangat membutuhkan dukungan seperti baju APD, vitamin, kasur, oksimeter dan sebagainya. Sebab situasi di lapangan sudah sangat berat seiring melonjaknya kasus baru terkonfirmasi maupun kasus kematian di DIY saat ini.

" Kami di Sonjo kemudian melakukan fundraising untuk membantu shelter Desa dan RS di DIY dalam penanganan Covid-19. Kami di Sonjo mengapresiasi bantuan yang diberikan para pihak dalam penanganan covid ini, sehingga pasien dapat tertangani secara optimal," ujar Rimawan.

Perkembangan kasus Covid-19 di DIY yang telah melampaui rekor tertinggi. DIY berada dalam zona merah dan menjadi 5 besar provinsi dengan penambahan harian kasus tertinggi. DIY memiliki 27 RS Rujukan Covid-19, tetapi akibat lonjakan kasus ini, seluruh RS Rujukan Covid-19 tersebut penuh dan tidak dapat menampung pasien lagi. RS hanya mampu menangani pasien dengan gejala berat yang membutuhkan penanganan medis secara intensif.

Untuk mengantisipasi pasien tanpa gejala yang isolasi mandiri (isoman) yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana mestinya, Sonjo dan Pemkab di DIY bekerja sama membangun shelter tangguh di beberapa lokasi untuk isolasi mandiri bagi pasien tanpa gejala, dengan gejala ringan sampai sedang.

Mengingat Covid-19 masih belum dapat diprediksi kapan akan berakhir, maka keberlangsungan operasi shelter ini memerlukan dukungan dari seluruh pihak, terutama dari pihak swasta dan individu. Perlu adanya sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam meringankan penanganan Covid-19 di DIY terutama dalam penyediaan peralatan untuk memenuhi kebutuhan shelter, antara lain kasur dan perlengkapan, APD, alat masak, paket sembako, dan lain sebagainya. **(Ira)**